

PENDEKATAN POLITIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI DESA KABUNA KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU

Prudencio Afonso
prudencioafonso@yahoo.com
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Timor

ABSTRAK

Penelitian judul Pendekatan Politik Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Desa Kabuna Tahun 2017 Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan Pendekatan Politik Dalam Implementasi program Bantuan Rumah Huni Tahun 2017. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dimana menjadi fokus penelitian adalah pendekatan politik terhadap masyarakat, program pengimplementasikan kepada masyarakat, manfaat program yang sebenarnya dan tepat pada sasaran atau kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain Observasi, Wawancara dan Dokumen. Untuk analisis dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan verifikasi Data. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam pengimplementasian program rumah layak huni itu berdasarkan aturan, tepat pada sasaran, dalam perekrutan unit pengelola kegiatan (UPK) juga harus melalui musyawara mufakat sehingga dalam pelaksanaannya program yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan itu tidak tergantung pada kepala desa namun harus berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun Desa Kabuna demi kesejahteraan Masyarakat Umum Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan kepada kepala Desa Kabuna agar kedepannya dalam proses pelaksanaan program tersebut harus lebih terbuka dalam tahap pelaksanaan kegiatan masyarakat harus dilibatkan untuk mengetahui tujuan program.

Kata Kunci : Pendekatan Politik Dan Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni.

ABSTRACT

The title of the research is Political Approach in the Implementation of the Livable Home Program in Kabuna Village in 2017 Kakuluk Mesak District, Belu Regency. The purpose of the research is to describe the Political Approach in the Implementation of the 2017 Residential Home Assistance program. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach where the focus of the research is the political approach to the community, implementing programs to the community, the actual benefits of the program and right on target or to low-income people. Data collection techniques used include Observation, Interview and Document. The analysis in this study was carried out in three stages, namely Data Reduction, Data Presentation, and Data Verification. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of the habitable housing program is based on the rules, right on target, in the recruitment of the activity management unit (UPK) must also go through consensus deliberation so that in implementing the program carried out by the Activity Management Unit it does not depend on the village head but must run according to the rules that have been set by the local government and Kabuna Village for the welfare of the General Community of Kabuna Village, Kakuluk Mesak District, Belu Regency. Based on these conclusions, it is recommended to the head of Kabuna Village that in the future the program implementation process must be more open in the implementation stage of community activities to be involved to find out the program's objectives.

Keywords: Political Approach and Implementation of the Housing Assistance Program.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan social merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materi yang diliputi oleh rasa keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhannya dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD yang berlaku. Kebutuhan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan setiap warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Menurut Pasal 1 ayat (7) UU NO 1TAHUN 2011)

di atas untuk kesejahteraan masyarakat umum Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni serta aset bagi pemilikinya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi Individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Salah satu kabupaten yang melaksanakan program rumah layak huni adalah kabupaten Belu yang di distribusi langsung kesetiap Desa-Desa yang ada di Kabupaten Belu. Program rumah layak huni di kabupaten Belu dimulai pada Tahun 2017. Program ini merupakan program pemerintahan pusat guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan

pada masyarakat didaerahnya dimana hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun di tahap yang sama juga kondisi di tahun 2016 juga program pemerintah pusat memberikan bantuan rumah yang sama pada tujuan yaitu untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) guna memenuhi kebutuhan hidupnya namun di dalam tingkat pelaksanaan program bantuan rumah layak huni tersebut yang dominan sebagai peserta penerima bantuan tersebut adalah ketiga dusun tersebut atau dusun yang sama mengapa demikian dari latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat masalah atau persoalan ini untuk dikaji bersama maka alasan peneliti dalam mengambil masalah ini adalah adanya kepentingan, pendekatan, atau aktor-aktor. Dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Desa Kabuna dimana bertentangan dengan aturan yang di atur atau di rumuskan oleh pemerintah pusat pada UUD NO 1 TAHUN 2011 tentang rumah dan perumahan yang bertujuan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Oleh karena itu pembangunan kesejahteraan social perlu menunjukkan peranan dan memberikan sumbangan yang nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik dari material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya di laksanakan oleh

pemerintah bersama- sama masyarakat dengan demikian diperlukan lingkungan kebijakan yang ilmiah dan konduktif yang mendorong masyarakatnya untuk dapat berperan aktif secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial pemerintah telah menyelenggarakan banyak program-program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Seperti program perumahan rakyat dan lain-lain, yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perumahan layak huni adalah rumah atau perumahan yang di bangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok yang meliputi perbaikan, pemugaran perluasan pembangunan rumah baru beserta lingkungan sekitarnya. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), yang ada di Indonesia pemerintah membuat program bantuan perumahan layak huni. (Menteri Perumahan Rakyat (MENPERA).(2012).

Kenyataannya untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan perkara gampang Ketidaksanggupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dalam artinya bahwa penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat keadaan serta gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik secara umum. Oleh karena itu Menurut Sugiyono (2001:57) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah generalisasi dari obyek-obyek yang mempunyai kuantitas tertentu yang diharapkan oleh peneliti untuk di pelajari kemudian ditarik kesimpulan. Berkaitan dengan efisiensi diatas, maka populasi merupakan jumlah keseluruhan dari jumlah analisis yang memiliki karekteristik secara umum yang dapat diketahui secara jelas sehingga yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa yang terdiri dari 3 orang dan masyarakat penerima bantuan rumah perumahan 7 orang dengan rincian sebagai berikut Kepala Desa 1 orang Sekertaris Desa 1 orang Kaur Desa 1 orang Masyarakat Penerima Bantuan perumahan 8 Orang Jumlah 11 Orang. Jumlah populasi sedikit yaitu 10 orang, maka penulis menjadikan populasi atau teknik pengambilan sampel sampai jenuh dan total. Dengan tujuan lebih menjamin akurasi data yang

diperoleh melalui dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian lapangan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dalam implementasi program rumah layak huni tahun 2017 di Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu untuk pembangunan fisik (program bantuan rumah kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah) Pendekatan politik dalam implementasi program rumah layak huni di Desa Kabuna Dan kita akan tahu .Apa itu pendekatan politik? Apa itu program rumah layak huni? Defenisi Operasional. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh dilokasi penelitian kemudian diolah dan ditabulasi berdasarkan sifat dan jenis selanjutnya diinterpretasi secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh dilokasi penelitian kemudian diolah dan ditabulasi berdasarkan sifat dan jenis selanjutnya diinterpretasi secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Miles dan Huberman (2007,16-20 penerjemah: Rohidi), mengemukakan bahwa analisis terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut penjelasan dari alur kegiatan dari analisis sebagai berikut:

a) Pengumpulan data

Data collecting atau pengumpulan data yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam penelitian.

b) Reduksi data

Data reduction atau penyederhanaan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dengan membuat abstraksi, mengubah data mentah menjadi yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang diperiksa. Tahap ini merupakan analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat sekaligus dapat dibuktikan.

c) Penyajian data

Data display atau penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga diperlukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

d) Penarikan kesimpulan/verifikasi

Conclutions drawing atau penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

PEMBAHASAN

Untuk memberikan defenisi politik ada beberapa ahli mengemukakan pendapat sebagai: Menurut Diliar Noer (1983:6) politik adalah segala

aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah dan mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Melihat defenisi ini maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia baik berupa kegiatan, aktivitas ataupun sikap yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tekanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik justru politik memerlukan agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan dalam masyarakat Politik sebagai kegiatan dikemukakan oleh Meriam Budiarijo (1982:8) sebagai berikut. Pada umumnya dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu' Dengan adanya defenisi dari Diliar Noer maupun Meriam Budiarijo pada prinsipnya mengandung persamaan dimana kedua pakar ini melihat politik sebagai suatu kegiatan namun ada perbedaan dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan. Dilihat lebih lanjut lagi menurut Deliar Noer mengemukakan bahwa konsep politik tidak saja dilihat pada sudut perilaku tetapi melihat aspek sejarah yakni melihat dari perspektif sejarah bangsa Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan dimana mempunyai konsep yang lebih luas. Berdasarkan defenisi ini pengertian sistem politik sebagai hubungan manusia yang meliputi bentuk-bentuk kekuasaan, pengawasan, pengaruh, maka pengertian politik tidak lagi terbatas pada Negara, tetapi juga mencapai bentuk-bentuk persetujuan lainnya. Melihat defenisi ini maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia baik berupa kegiatan aktivitas ataupun sikap yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan demikian menggunakan kekuasaan. Hal ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik meskipun harus diakui dan tidak dapat dipisahkan dai politik justru politik memerlukannya agar suatu kebijakan berjalan dengan baik dan bertujuan untuk masyarakat.

Implementasi Program Rumah Layak Huni

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana suatu kebijakan atau program yang telah dibuat atau pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat teralisasi dan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dibuat akan sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan atau dilaksanakan terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau implementasi yang menentukan suatu kenerhasilan kebijakan

Model implementasi kebijakan dengan pendekatan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu Salah satu indicator kesejahteraan masyarakat yaitu dengan pengadaan bantuan program rumah layak huni yang belum terjangkau oleh masyarakat luas program pembangunan yang terukur, terarah, melalui bantuan program rumah layak huni merupakan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau dikategorikan sebagai masyarakat miskin implementasi program bantuan rumah layak huni bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kehidupan yang layak sehingga masyarakat tersebut bisa merasakan apa penting kesejahteraan dan peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang perumahan rakyat dimana dari legitimasi atau dasar, aturan ini bertujuan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR)

Manfaat Program Rumah Layak Huni

Tahun 2015 yang lalu memang memberikan titik cerah untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah layak. Pada tahun tersebut pemerintah meluncurkan program sejuta rumah program ini memang menjadi upaya pemerintah agar dapat memberikan hunian layak untuk masyarakat, terlebih dengan meningkatkan penduduk di Indonesia, kebutuhan akan ada tempat tinggalpun semakin tinggi Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang semakin tinggi pemerintah bukan hanya menawarkan program sejuta rumah namun pemerintah memberikan berbagai macam program untuk memperlancar masyarakat yang termasuk golongan berpenghasilan rendah agar mempunyai hunian yang layak Jenis hunian yang dibangun meliputi tapak dan rusung. Pembangunan unit ini tersebar di mana-mana. Pemerintah memang begitu optimis untuk membangun satu juta rumah, seharusnya sebagai masyarakat kita juga mendukung program ini, terlebih jika selama ini ada ingin memiliki rumah namun modal yang dimiliki sangat terbatas.

Keinginan Dari Pemerintah

Keinginan dari pemerintah yaitu kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki dominasi pada urusan bersama yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan suatu negara di Indonesia kebijakan penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui program-program bantuan yang terangkum dalam konsep percepatan penanggulangan kemiskinan nasional hal ini pun terjadi di daerah khususnya di daerah kota maupun di daerah Desa. Indonesia sudah menetapkan bahwa program rumah layak huni yaitu program yang membantu penyediaan kebutuhan rumah bagi keluarga yang kurang mampu serta dalam mewujudkan program nasional sejuta rumah. Selain itu juga sebagai upaya percepatan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat

Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kebijakan merupakan intervensi pemerintah yang bersifat mengikat untuk memecahkan masalah publik. Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah, suatu persoalan atau melaksanakan suatu program. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang diusulkan atau dimaksudkan selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan antara alternatif yang ada (Budi Winarno, 2007:11). Menurut Friedrich Carl Mengemukakan yang dimaksud dengan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau suatu lingkungan tertentu yang menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu (Irfan Islam, 1999:17)

Implementor

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan bagi elit, jika program tersebut tidak dengan baik, oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan dengan baik dan tepat pada sasaran (Masyarakat berpenghasilan rendah), yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia

Sumber Daya

Sumberdaya yang dimaksud disini adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan sumberdaya tidak selalu bersifat fisik tetap juga nonfisik sumberdaya yang dapat berupa baik menjadi semakin besar maupun hilang dan adapula sumberdaya yang selalu tetap. Namun sumberdaya yang dihasilkan di masyarakat Desa Kabuna sangat minim dan berubah-ubah sehingga masyarakat di Desa Kabuna sampai saat masih dikategorikan kelompok lemah. Dengan pernyataan ini maka pemerintah pusat memberikan bantuan program rumah layak huni kepada masyarakat Desa Kabuna akan tetapi dalam implementasi program rumah layak huni tersebut tidak tepat pada sasaran dan bertolak dengan aturan yang telah ditetapkan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pendekatan politik dalam implementasi program bantuan rumah layak huni di Desa Kabuna kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu;

a. Pelaksana program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Kabuna itu tidak berjalan sesuai aturan dan kepala Desa itu menjalankan atau melaksanakan program itu sesuai aturan yang kepala Desa inginkan dan tidak pandang akan

pentingnya aturan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat umum

b. Program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa setempat tidak melalui aturan sehingga pada pelaksanaan program bantuan rumah layak huni tersebut tidak tepat pada sasaran dan dalam pelaksanaan tersebut kepala Desa membentuk kelompok Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dan dalam pembentukan tersebut tidak bersifat transparan namun perekrutan berdasarkan kemauan kepala Desa Kabuna tersebut.

c. Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni tidak tepat pada sasaran karena adanya asas kekeluargaan atau pada umumnya pemerintah Desa melaksanakan bantuan program rumah layak huni tersebut melalui pendekatan politik dan tidak memaggap akan pentingnya kesejahteraan masyarakat umum yang ada di Desa Kabuna.

d. Dalam pengimplementasikan program bantuan rumah layak huni ini semuanya tergantung pada arahan kepala Desa bukan pengimplementasikan program ini berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah demi kesejahteraan Masyarakat umum Desa Kabuna.

Saran

- a. Sebagai seorang pemimpin itu harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan atau juknis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan netralisasi terhadap pemerintah atau aparat Desa sehingga pada saat pelaksanaan program bantuan tersebut tepat pada masyarakat yang membutuhkan program bantuan rumah layak huni
- b. Menjadi pemimpin yang baik itu selalu bersikap netralisasi dan hindari sikap oteriter sehingga pada pemberdayaan kedepanya bisa berjalan sesuai dengan aturan sehingga masyarakat bisa merasakan kesejahteraan
- c. Pemimpin yang dikatakan baik baik apabila selalu terbuka pada masyarakat dan selalu mengetahui kekurangan atau keterbukaan masyarakat sehingga bisa menyampaikan aspirasi masyarakat melalui program dan bantuan pemerintah
- d. Dengan hal seperti ini maka pemerintah Desa harus lebih melihat pada keadaan masyarakat turut dan turun ikut melihat kondisi masyarakat, terbuka dalam pelaksanaan kegiatan dan berpihak pada masyarakat buka pada asas kekeluargaan karena pemimpin artinya untuk semua warga masyarakat bukan pada faktor kekeluargaan

DAFTAR PUSTAKA

Rohman Didik Fathkur, dkk. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu. Diakses dari Purwanto Erwan Agus, Ph. dan Dyah Ratih Sulist, Implementasi Kebijakan Publik, Gava Media, Yogyakarta, 2012 hlm 20.

Leo Agutino. 2018 *Dasar-Dasar kebijakan publik*. Bandung Alfabeta

Edwards George 1980 *Implementin Public Policcy* Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya

Hanifah Harsono 2002 *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT Mutiara Sumber Widya.

Didik Fathkur Rohman, dkk. *Implementasi Kebijakan Pelayanan*

Jurnal Trikomara, R. sebayang M. dan putri M.E 2007. *Analisis kebutuhan Rumah Layak Huni di Kelurahan* Kabupaten jurnal.

Stimulan. *Bedah Rumah Studi Kasus di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*, Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016

Rejkningsih Triwayuni, "Identifikasi Factor Penyebab Kemiskinan di Kota Serang. Vol. 72 No 1, juni 2011.